



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

RENCANA KERJA

DINAS KOPERINDAG

Tahun 2025

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

Alamat: Jl. Amran Nur Desa Kolok Mudik Kota Sawahlunto

E-mail: koperindag@sawahlunto.go.id

KATA PENGANTAR

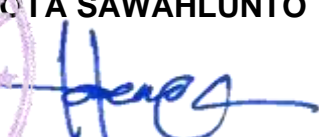
Melalui Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto ini dapat terlihat program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan perekonomian di Kota Sawahlunto dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Rencana Kerja sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mudah-mudahan Rencana Kerja Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dimasa yang akan datang, sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Ekonomi Kota Sawahlunto.

Sawahlunto, 20 Maret 2024

**KEPALA DINAS KOPERINDAG
KOTA SAWAHLUNTO**




TATANG SUMARNA, SE
NIP.19721026 200701 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|----------------|--|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| | |
| BAB I | PENDAHULUAN |
| 1.1 | Latar Belakang 1 |
| 1.2 | Landasan Hukum 2 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan 5 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan 6 |
| | |
| BAB II | HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU |
| 2.1 | Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7 |
| 2.2 | Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16 |
| 2.3 | Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Peragkat Daerah 18 |
| 2.4 | Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19 |
| | |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH |
| 3.1 | Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 21 |
| 3.2 | Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 21 |
| 3.3 | Program dan Kegiatan 22 |
| | |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26 |
| | |
| BAB V | PENUTUP 32 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program dan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto yang bersifat makro yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto berupa dokumen perencanaan 3 (tiga) tahun ke depan.

Penetapan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan konsekwensi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang penyusunannya berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Seterusnya bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, sasaran 3 (tiga) tahunan yang tertuang dalam rencana strategis dinas dijabarkan melalui kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto yang seterusnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang kemudian dijadikan dokumen-dokumen pendukung bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memuat program-program pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang diatur dalam urusan wajib dan pilihan.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2025 merupakan bahan bagi Walikota selaku Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat dan juga nantinya dijadikan sebagai tolak ukur bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam menilai pertanggungjawaban Walikota pada setiap akhir tahun. Untuk hal yang diuraikan di atas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyusun Rencana Kerja tahun 2025 sesuai dengan apa yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto 2024-2026 yang mencakup Visi , Misi , Tujuan , Sasaran serta cara pencapaian tujuan.

1.2 Landasan Hukum

Oleh karena Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dibuat berdasarkan kepada Renstra Dinas dan RPJMD Kota Sawahlunto, maka landasan hukumnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta landasan operasionalnya seperti :

1. Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan.
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.

15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 96);
16. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-292-2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3-210-2023 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025, secara umum bertujuan memberikan arah dan tuntunan bagi dinas untuk melaksanakan pembangunan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang dijadikan sebagai pedoman kerja dalam mengisi pembangunan Kota Sawahlunto. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan bahan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Kota Sawahlunto.
2. Menyediakan tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan bagi setiap bidang yang ada.
3. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto melalui program dan kegiatannya.
4. Memudahkan seluruh bidang yang ada dalam mewujudkan rencana strategis dinas dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai 2 urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun urusan wajib yang dilaksanakan adalah urusan koperasi, Usaha Kecil Menengah, sedangkan urusan pilihan adalah urusan Perindustrian, dan Perdagangan.

Pada tahun 2023 guna mensukseskan pembangunan ekonomi kerakyatan, telah dianggarkan pada APBD sebesar Rp. 32.769.982.270,- realisasi sebesar Rp. 26.104.797.405,-

Dengan dana yang tersedia, maka telah dilaksanakan 12 program dengan 17 kegiatan dan 28 sub kegiatan sebagaimana uraian berikut ini :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan dengan 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
3. Program Penilaian kesehatan ksp/usp koperasi dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
4. Program Pendidikan dan latihan perkoperasian dengan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan
5. Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (umkm) dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
6. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
7. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

8. Program Pengembangan ekspor dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
9. Program Standarisasi dan perlindungan konsumen dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
10. Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
11. Program Perencanaan dan pembangunan industri dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
12. Program Pengendalian izin usaha industri Kab/Kota dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

Selanjutnya dapat kami uraikan pelaksanaan dari masing-masing program dan kegiatan sesuai urusan seperti tabel berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Sawahlunto

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperindag

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022) | Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi | Target Kinerja dan Pagu APBD | Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang Dievaluasi (2023) | Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 (%) | |
|------|----|---|------|---|---|---|--|---|---|------------------------------|---|---|----|
| 1 | | | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 |
| | | | | | | Output | Satuan | K | K | K | K | K | K |
| | | | | | TOTAL | | | | | | | | |
| 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| 2 | 17 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Urusan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tertib | Bulan | 36 | 24 | 12 | 12 | 100 | |
| 2 | 17 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana Pelayanan administrasi keuangan | Bulan | 36 | 24 | 12 | 12 | 100 | |
| 2 | 17 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan | laporan | 36 | 24 | 12 | 12 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|----|--|--|---------|----|----|-----|-----|----|-----|
| 2 | 17 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase aparatur yang meningkat SDM nya | % | 36 | 28 | 38 | 38 | 37 | 96 |
| 2 | 17 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | orang | | | 10 | 10 | 11 | 110 |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran | Bulan | 38 | 38 | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | paket | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Paket | 36 | | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Laporan | | | 100 | 100 | 56 | 56 |
| 2 | 17 | 1 | 2 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kendaraan Dinas yang tersedia | unit | 3 | 1 | 1 | 1 | | - |
| 2 | 17 | 1 | 2 | 07 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan | Kendaraan Dinas yang tersedia | unit | | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 2 | 17 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang baik dan layak pakai | Bulan | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 2 | 17 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat | laporan | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 2 | 17 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | laporan | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 100 |
| | | | | | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | laporan | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 2 | 17 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Bulan | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 2 | 17 | 1 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas | unit | | 24 | 18 | 18 | 18 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|----|---|---|------------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|
| 2 | 17 | 1 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung kantor dan bangunan pemeliharaan gedung kantor | unit | | 24 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 2 | 17 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | unit | | 24 | 100 | 100 | 38 | 38 |
| 2 | 17 | 3 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian | % | 26,47 | 18 | 26,47 | 26,47 | 66,66 | 252 |
| 2 | 17 | 3 | 2.01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persenatse koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu | % | 74 | 63 | 74 | 74 | 49 | 66 |
| 2 | 17 | 3 | 2.01 | 1 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | unit usaha | | 5 | 70 | 70 | 69 | 99 |
| 2 | 17 | 3 | 2.01 | 2 | Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kab/kota | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja | unit usaha | | 65 | 70 | 70 | - | - |
| 2 | 17 | 4 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi Sehat | % | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 100 |
| 2 | 17 | 4 | 2.01 | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang mempunyai laporan keuangan yang sehat | % | 80 | 84 | 80 | 80 | 40,57 | 51 |
| 2 | 17 | 4 | 2.01 | 1 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | unit usaha | 50 | 44 | 70 | 70 | 30 | 43 |
| | | | | | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota | Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan | unit usaha | | | 1 | 1 | 6 | 600 |
| 2 | 17 | 5 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% | % | 60 | 100 | 60 | 60 | 43,47 | 72 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|---|---|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 2 | 17 | 5 | 2.01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat | % | 74 | 100 | 74 | 74 | 21,37 | 29 |
| 2 | 17 | 5 | 2.01 | 1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Orang | 74 | 242 | 68 | 68 | 90 | 132 |
| 2 | 17 | 5 | 2.03 | | Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Jumlah UMKM yang bersertifikat | UMKM | 240 | 184 | 10 | 10 | 90 | 900 |
| 2 | 17 | 5 | 2.03 | 1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro | Orang | 210 | 184 | 105 | 105 | 90 | 86 |
| 2 | 17 | 7 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang memiliki izin usaha | % | 53 | 4,6 | 53 | 53 | 46 | 87 |
| 2 | 17 | 7 | 2.01 | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase UMKM yang difasilitasi | % | | 4,4 | 4 | 4 | 4,5 | 113 |
| 2 | 17 | 7 | 2.01 | 4 | Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | unit usaha | 4 | | 4 | 60 | 75 | 1.875 |
| 2 | 17 | 7 | 2.01 | 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Orang | 600 | | 200 | 200 | 211 | 106 |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%) | % | | | 1,5 | | | |
| | | | | | Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil | Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya | UMKM | | | 50 umkm | | | |
| | | | | | Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran,SDM,serta desain dan teknologi | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | unit usaha | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|---|---|--|--------------|-----------|--------|----------|-------|--------|--|-----|--|
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Pasar rakyat dengan minimal tipe C | % | | | 50 | 50 | | | - | |
| 3 | 30 | 3 | 2.01 | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola/pengurus | % | | - | 80 | 80 | | | - | |
| 3 | 30 | 3 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | unit | | | 2 | 2 | 2 | | 100 | |
| | | | | | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 4 | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto | | 27.015,91 | 25.000 | 27015,91 | 27016 | 26.490 | | | |
| 3 | 30 | 4 | 2.02 | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvei | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | 100 | |
| 3 | 30 | 4 | 2.02 | 1 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 100 | |
| 3 | 30 | 4 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 2 | 2 | 2 | 0 | - | | - | |
| 3 | 30 | 5 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase produk unggulan yang diekspor | % | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | | 83 | |
| 3 | 30 | 5 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah produk unggulan yang dipromosikan | produk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 100 | |
| 3 | 30 | 5 | 2.01 | 3 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | Pelaku Usaha | | | 8 | 8 | 13 | | 163 | |
| 3 | 30 | 6 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase pasar tradisional tertib ukur | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 28,57 | | 95 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|---|--|---|-------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 3 | 30 | 6 | 2.01 | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Persentase timbangan yang ditera | % | 70 | 50 | 70 | 70 | 12 | 17 |
| 3 | 30 | 6 | 2.01 | 1 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | unit | | | 391 | 391 | 47 | 12 |
| 3 | 30 | 7 | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Nilai produk lokal yang terjual | juta rupiah | 300 | 64 | 125 | 125 | 72 | 58 |
| 3 | 30 | 7 | 2.01 | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase produk lokal yang dipromosikan | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 3 | 30 | 7 | 2.01 | 1 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | UMKM | 45 | 15 | 15 | 15 | 13 | 87 |
| 3 | 31 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 2 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase IKM yang meningkat skala usahanya | % | 2 | | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan indsutri | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | Penyusunan rencana pembangunan industri kab/kota | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | dokumen | | | | | | |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 4 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | dokumen | | | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 5 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | dokumen | | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | | | | |
| 3 | 31 | 3 | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin | % | 30 | | 30 | 30 | 44,5 | 148 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|---|--|--|--------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3 | 31 | 3 | 2.01 | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan | rekomendasi | 50 | | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 3 | 31 | 3 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 100 | | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase IKM yang terpublis | % | 100 | | | | | |
| | | | | | Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota | Jumlah Jenis database industri yang dipublis | database | 1 | | | | | |
| | | | | | Diseminasi, Publikasi data informasi dan Analisa Industri Kab/Kota melalui SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | Dokumen | 1 | | | | | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 ini telah banyak memberikan kontribusi pelaksanaan pembangunan dibidang perekonomian, dimana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya melalui rencana kerja dari tahun ke tahun dapat menunjang perekonomian Kota Sawahlunto.

Pada Bidang koperasi Usaha Mikro kecil dan menengah dalam rangka peningkatan jumlah koperasi berprestasi yang ditandai dengan meningkatnya omset, asset dan Sisa Hasil Usaha serta kuatnya kelembagaan koperasi merupakan salah satu program dan kegiatan yang direncanakan oleh bidang koperasi yang dituangkan dalam renstra Dinas Koperindag Kota Sawahlunto disamping visi bidang koperasi sendiri yaitu menjadikan koperasi, UMKM sehat dan kuat dengan misinya Memberdayakan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dalam rangka mewujudkan Sawahlunto yang sejahtera.

Berbicara sektor Perdagangan maka sarana perdagangan berupa pasar merupakan salah satu komponen dalam suatu system perdagangan di perkotaan dan perdesaan. Upaya Pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat salah satunya dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi.

Dalam penataan dan perencanaan pengembangan Industri disadari sepenuhnya bahwa tantangan yang dihadapi adalah persaingan yang semakin ketat terutama dari segi kualitas, kuantitas dan desain yang beragam baik dari dalam maupun luar daerah bahkan luar negeri. Daya saing yang tinggi perlu dilakukan secara mikro di masing-masing sektor Industri kerajinan yang setiap hari muncul berbagai macam produk kerajinan. Seiring dengan itu kita menyadari dengan segala keterbatasan tetap melakukan pembinaan ke arah yang lebih baik.

Untuk mengetahui lebih rinci tentang kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tiga tahun ke depan yaitu periode renstra 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperindag
Kota Sawahlunto

| No | Indikator | SPM Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analis |
|----|--|----------------------|-----|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| | | | | Tahun 2023 (Tahun n-2) | Tahun 2024 (Tahun n-1) | Tahun 2025 (Tahun n) | Tahun 2026 (Tahun n+1) | Tahun 2027 (Tahun n+2) | Tahun 2023 (Tahun n-2) | Tahun 2024 (Tahun n-1) | Tahun 2025 (Tahun n) | Tahun 2026 (Tahun n+1) | |
| 1 | Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu | | | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | |
| 2 | Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi Industri | | | | 40 | 50 | 60 | | | | 50 | 60 | |
| 3 | Persentase Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No.15/PER/M.KUKM/IX/2015 | | | | 27 | 28 | 29 | | | | 28 | 29 | |
| 4 | Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas (%) | | | | 8,8 | 8,8 | 8,9 | | | | 8,8 | 8,9 | |
| 5 | Persentase meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha (%) | | | | 17 | 20 | 22 | | | | 20 | 22 | |

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam memberikan pelayanan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu , perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Belum optimalnya kuantitas SDM yang sesuai dengan standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
4. Belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran.
5. Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi.

Suatu kondisi atau keadaan yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Desa sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Organisasi Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Barenlitbangda. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kota Sawahlunto Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperindag

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|--|------------|--|--------------------|---|
| 1 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | | Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%) | 14 | |
| | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola /pengurus (%) | 80 | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Sawahlunto | Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar) | 50 | 4 Usulan Pokir : - ADEPRON, 30,000,000 - IWAN KURNIAWAN, 35,000,000 - IRLAND, 20,000,000 - JHONI WARTA, 25,000,000 |
| 2 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | | Persentase Pencapaian sasaran Pembangunan Industri Termasuk turunan Indikator Pembangunan Industri dan RIPIN dan Ditetapkan dalam RPIP (%) | 2 | |
| | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan industri (%) | 50 | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Sawahlunto | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen) | 6 | 6 usulan Pokir : - NELDASWENTI, 30,000,000 - ELFIA RITA DEWI, 10,000,000 - RONALD KARDINAL, 18,000,000 - IRLAND, 20,000,000 - RONALD KARDINAL, 18,000,000 - ELFIA RITA DEWI, 10,000,000 |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan merupakan suatu keharusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah, namun karena keterbatasan sumberdaya, perlu ditetapkan skala prioritas yang fokus pada kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Penetapan prioritas pembangunan daerah didasarkan pada pertimbangan dan acuan berikut:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Bersifat penting dan mendesak untuk dilaksanakan
3. Bersifat realistis dan dapat dilaksanakan
4. Merupakan tugas pemerintah daerah
5. Program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto bertujuan untuk:

1. Pedoman bagi bidang - bidang yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto untuk tahun 2025.
2. Memberikan gambaran program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto untuk tahun 2025.
3. Sebagai bahan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

4. Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto tahun 2025 yang bersumber dari APBD Kota Sawahlunto.
5. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah

Sedangkan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto adalah:

1. Untuk pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas yang di rencanakan tiap tahun.
2. Untuk mewujudkan program dan kegiatan dan implementasinya di lapangan.
3. Untuk menampung aspirasi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Secara umum Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto mengacu kepada peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2007. Program dan kegiatan ini untuk tahun 2025 sudah tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto secara garis besar dan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2024-2026.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan ini untuk tahun 2025 sudah tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto secara garis besar dan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 sebagaimana uraian berikut:

Jumlah Program 7 dengan 11 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan Sumber Dana APBD dengan sebesar Rp.9.296.283.135

| | <u>Program</u> | | <u>Kegiatan</u> | | <u>Sub Kegiatan</u> |
|---|---|---|--|----|--|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN |
| | | 2 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| | | 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |
| | | | | 4 | Penyediaan peralatan Perlengkapan kantor |
| | | | | 5 | Penyediaan bahan logistik kantor |
| | | | | 6 | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan |
| | | | | 7 | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi OPD |
| | | 4 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 8 | Penyediaan Jasa surat menyurat |
| | | | | 9 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik |
| | | | | 10 | Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor |
| | | 5 | Pemeliharaan BMD Penunjang urusan pemerintah daerah | 11 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan |
| | | | | 12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya |
| | | | | 13 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya |

| | | | | | |
|---|--|----|--|----|---|
| 2 | Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi | 6 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kab/kota | 14 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota |
| 3 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | 7 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 15 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha |
| 4 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 8 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 16 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| 5 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 9 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota | 17 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Kabupaten /Kota |
| 6 | Program Pengembangan Ekspor | 10 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 18 | Pameran Dagang Lokal |
| 7 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 11 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 19 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri |
| | | | | 20 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Sawahlunto

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting (pokir yg sudah di input kedalam SIPD) | Prakiraan Maju rencana Tahun 2026 | | | | |
|------|----|----|----------|--------|--|---|---------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi Output Kegiatan | Tar get Cap aian Kin erja | Su mb er da na | PAGU yang dientry ke aplikasi | | | Target capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Kete raga n Verif ikasi |
| | | | | | | | | | | | | | Tolok Ukur | Targ et | | |
| | | | | | | | | | | 9.296.283.135 | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | Persentase Temuan BPK dan Inspektorat yang diTindak Lanjuti % | | 100 | | 8.769.456.460 | | Bulan | 12 | 7.213.000.000 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Keuangan Perangkat Daerah Terhadap Aliran Kas (%) | | 100 | | 6.805.151.469 | | Bulan | 14 | 3.610.000.000 | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 2 | 0 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Sawah lunto | 42 | APB D | 6.805.151.469 | | Bulan | 14 | 3.610.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------------------|--------|---|--|----------------|-----------|----------|--------------------|--|--------------|----|--------------------|--|
| | | | | | | (Orang/bln) | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang Berkapasitas (%) | | 80 | | 1.300.000 | | % | 27 | 210.000.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 5 | 0 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | Sawah lunto | 1 | APB D | 1.300.000 | | % | 27 | 210.000.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor dalam Keadaan Baik (%) | | 1 | | 358.383.915 | | Bulan | 12 | 823.000.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 6 | 0 1 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | Sawah lunto | 3 | APB D | 2.400.000 | | Bulan | 12 | 28.000.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 6 | 0 2 | Penyediaan peralatan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | Sawah lunto | 2 | APB D | 245.451.115 | | Bulan | 12 | 260.000.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 6 | 0 4 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | Sawah lunto | 12 | APB D | 13.700.000 | | Bulan | 12 | 125.000.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 6 | 0 5 | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | Sawah lunto | 12 | APB D | 9.572.800 | | Bulan | 12 | 60.000.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 6 | 0 9 | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi OPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | Sawah lunto | 50 | APB D | 87.260.000 | | Bulan | 12 | 350.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------------------|--------|--|---|-------------|------------|-------|----------------------|--|--------------|-----------|----------------------|--|
| 2 | 17 | 01 | 2.0 8 | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik (%) | | 100 | | 1.482.328.276 | | Bulan | 12 | 2.105.000.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 8 | 0 1 | Penyediaan Jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | Sawah lunto | 12 | APB D | 100.000 | | Bulan | 12 | 5.000.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 8 | 0 2 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | Sawah lunto | 12 | APB D | 292.816.800 | | Bulan | 12 | 300.000.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 8 | 0 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | Sawah lunto | 12 | APB D | 1.189.411.476 | | Bulan | 14 | 1.800.000.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 9 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase aset yang terpelihara (%) | | 20 | | 122.292.800 | | Bulan | 12 | 445.000.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 9 | 0 1 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | Sawah lunto | 18 | APB D | 118.073.200 | | Bulan | 12 | 220.000.000 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.0 9 | 0 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | Sawah lunto | 2 | APB D | 249.600 | | Bulan | 12 | 150.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------------------|--------|---|---|-------------|----|-------|--------------------|--|-------|----|--------------------|--|
| 2 | 17 | 01 | 2.0 9 | 1 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | Sawah lunto | 22 | APB D | 3.970.000 | | Bulan | 12 | 75.000.000 | |
| | | | | | Urusan Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | 220.840.000 | | | | 825.000.000 | |
| 2 | 17 | 04 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP | Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%) | | 66 | | 19.940.000 | | % | 58 | 260.000.000 | |
| 2 | 17 | 04 | 2.0 1 | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kab/kota | Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas (unit) | | 35 | | 19.940.000 | | Unit | 58 | 260.000.000 | |
| 2 | 17 | 04 | 2.0 1 | 0 1 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan(unit) | Sawah lunto | 35 | APB D | 19.940.000 | | UNIT | 35 | 100.000.000 | |
| 2 | 17 | 07 | | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%) | | 20 | | 200.900.000 | | % | 20 | 205.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------------------|--------|---|--|-------------|-----------|-------|--------------------|--|----------|-----------|----------------------|--|
| 2 | 17 | 07 | 2.0 1 | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase UMKM yang difasilitasi (%) | | 4 | | 200.900.000 | | % | 4 | 205.000.000 | |
| 2 | 17 | 07 | 2.0 1 | 0 4 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (unit) | Sawah lunto | 20 | APB D | 200.900.000 | | UNIT | 35 | 85.000.000 | |
| | | | | | Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | | | | | 143.126.100 | | | | 1.160.000.000 | |
| 3 | 30 | 03 | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%) | | 14 | | 110.399.800 | | % | 14 | 500.000.000 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.0 1 | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola /pengurus (%) | | 80 | | 110.399.800 | | % | 80 | 500.000.000 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.0 1 | 0 2 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar) | Sawah lunto | 50 | APB D | 110.399.800 | 4 Usulan Pokir : - ADEPRON, 30,000,000 - IWAN KURNIAWAN, 35,000,000 - IRLAND, 20,000,000 - JHONI WARTA, 25,000,000 | Pasar | 2 | 500.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----------|--------|---|---|-------------|-----|----------|--------------------|--|---------|-----|--------------------|--|
| 3 | 30 | 04 | | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional (%) | | 80 | | 13.126.300 | | % | 80 | 250.000.000 | |
| 3 | 30 | 04 | 2.0 2 | | <i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota</i> | <i>Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvei (%)</i> | | 100 | | 13.126.300 | | % | 100 | 250.000.000 | |
| 3 | 30 | 04 | 2.0 2 | 0 1 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Kabupaten /Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kab/ Kota (laporan) | Sawah lunto | 12 | APB D | 13.126.300 | | laporan | 250 | 100.000.000 | |
| 3 | 30 | 05 | | | Program Pengembangan Ekspor | Persentase produk unggulan yang diekspor (%) | | 50 | | 19.600.000 | | % | 50 | 200.000.000 | |
| 3 | 30 | 05 | 2.0 1 | | <i>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah jenis produk unggulan yang dipromosikan (produk)</i> | | 6 | | 19.600.000 | | produk | 8 | 200.000.000 | |
| 3 | 30 | 05 | 2.0 1 | 0 3 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku usaha) | Sawah lunto | 4 | APB D | 19.600.000 | | umkm | 50 | 200.000.000 | |
| | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | | | | | 162.860.575 | | | | 300.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-------------|----|-------|---------------|--|---------|----|---------------|--|--|
| | | | | | PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 02 | | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Persentase Pencapaian sasaran Pembangunan Industri Termasuk turunan Indikator Pembangunan Industri dan RIPIN dan Ditetapkan dalam RPIP (%) | | 2 | | 162.860.575 | | % | 2 | 100.000.000 | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan industri (%) | | 50 | | 162.860.575 | | % | 50 | 100.000.000 | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen) | Sawah lunto | 6 | APB D | 106.300.000 | 6 usulan Pokir : - NELDASWENT I, 30,000,000 - ELFIA RITA DEWI, 10,000,000 - RONALD KARDINAL, 18,000,000 - IRLAND, 20,000,000 - RONALD KARDINAL, 18,000,000 - ELFIA RITA DEWI, 10,000,000 | dokumen | 1 | 100.000.000 | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen) | Sawah lunto | 2 | APB D | 56.560.575 | | | 0 | | | |
| | | | | | TOTAL ANGGARAN | | | | | 9.296.283.135 | | | | 9.498.000.000 | | |

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja tahun 2025 merupakan program dan kegiatan tahun pertama pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2024-2026.
2. Rencana Kerja tahun 2025 ini dan tahun sebelumnya lebih terarah baik dari segi dana maupun dari segi kegiatan yang dilaksanakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

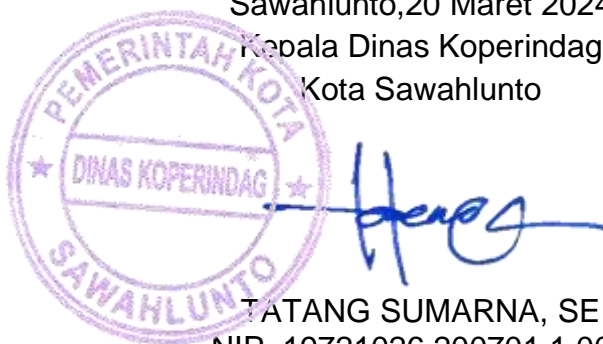
Dari kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan maka dapat di sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja yang disampaikan hendaknya bisa ditampung ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) karena program dan kegiatan ini telah terakomodir dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.
2. Guna kesempurnaan pencapaian dari tujuan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto ini maka perlu kiranya program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat ditampung secara keseluruhan karena sudah tertuang di dalam Rencana Stretegis Dinas.

Sawahlunto, 20 Maret 2024

Kepala Dinas Koperindag

Kota Sawahlunto



TATANG SUMARNA, SE
NIP. 19721026 200701 1 003

